
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2011

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Surabaya Tahun 2011 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2011 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA

Kota Surabaya berada di 7° 9'–7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2011 adalah sejumlah 3.023.680 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada Tahun 2011 berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.517.070 jiwa penduduk laki-laki (50,18%) dan 1.506.610 (49,82%) jiwa penduduk perempuan

Struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 60,61% pada tahun 2011. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi sebesar 34,41% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai

Kota Surabaya dengan penduduk kurang lebih sebanyak 3 juta jiwa merupakan pasar dan potensi ekonomi yang potensial. Selain didukung oleh sektor tersier yang sangat besar

peranannya, Surabaya juga didukung oleh sektor sekunder dengan kontribusi total mencapai 37,18% pada tahun 2011. Sektor tersebut terdiri atas sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 15,48%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,67% dan sektor konstruksi sebesar 5,34%. Perkembangan yang terjadi dalam sektor-sektor penggerak perekonomian kota tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat yang kondusif serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi. PDRB Kota Surabaya ditinjau dari segi produksi, yaitu berasal dari total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit Produksi di Kota Surabaya dalam periode tertentu.

Trend pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Trend penurunan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur maupun nasional. Besarnya pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2011 sebesar 7,52% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (7,22%) dan Nasional (6,46%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kota Surabaya membaik di tengah isu gejolak ekonomi global. Selain itu, dampak positif sebagai kota perdagangan terbesar kedua setelah DKI Jakarta, daya beli masyarakat di sini cukup tertolong dengan adanya persaingan antar usaha, sehingga masyarakatnya dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Peranan sektoral pada tahun 2011 tertinggi ada pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi sebesar 34,41%, sedangkan peranan Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 15,48%. Peranan sektor lainnya tidak berpengaruh sebesar kedua sektor tersebut, pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2011 sebesar 10,72%. Sektor yang peranannya sangat kecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian (0,01%), sedangkan Sektor Pertanian (0,08%)

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 –2015, dengan visi “**SURABAYA YANG LEBIH BAIK**” atau *Better Surabaya* maka strategi pembangunan kota Surabaya tahun 2011 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 - 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing global

-
- b. Peningkatan semangat kepahlawanan masyarakat Surabaya
 - c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender
 - d. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang didukung dengan pengembangan *multiple intelligent* (kecerdasan majemuk dan mental spiritual)
 - e. Peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen layanan kesehatan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - g. Penerapan pelayanan publik berstandar internasional (ISO) bidang investasi
 - h. Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien
 - i. Pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;
 - j. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja
 - k. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin
 - l. Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif
 - m. Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha
 - n. Peningkatan industri pariwisata
 - o. Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu;
 - p. Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
 - q. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu
 - r. Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota
 - s. Peningkatkan aktualisasi budaya lokal untuk mendukung pengembangan obyek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan.

C. **PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011, berikut uraian pencapaian pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015.

1. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pendidikan diimplementasikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pendidikan anak usia Dini

Pencapaian Program Pendidikan Anak Usia Dini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia dibawah 6 tahun 62.246 jiwa, sedangkan siswa dengan usia dibawah 6 tahun yang mengikuti jenjang pendidikan PAUD sebanyak 53.073 siswa atau 85,26 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia dibawah 6 tahun 62.246 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa yang mengikuti jenjang pendidikan PAUD sebanyak 53.073 siswa atau 85,26 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1) Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Pada tahun 2011, jumlah siswa jenjang SD/MI yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 40.575 siswa dari 40.575 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian atau 100 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Pada tahun 2011, jumlah siswa jenjang SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.260 siswa dari 38.362 siswa kelas 9 yang mengikuti ujian atau 99,73 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,86.% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,88%.

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 283.957 jiwa, sedangkan siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 230.386 siswa atau 92,68%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,95%.

4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 89.071 siswa atau 90,38%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 262.478 siswa atau 105,59 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,37 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 105,20%.

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 105.539 siswa atau 107,09%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105%.

7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Pada tahun 2011, jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 262.478 siswa jiwa, sedangkan jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 0 siswa atau 0%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0%

8) Angka Putus Sekolah (APS)SMK

Pada tahun 2011, jumlah siswa pada jenjang SMA/MA SMK sebanyak 46.533 jiwa, siswa, sedangkan jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 23 siswa atau 0,05%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,05%.

9) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

Pada tahun 2011, jumlah siswa tingkat SD/MI yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 40.575 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 40.079 siswa atau 98,78% melanjutkan ke jenjang SMP/MTs Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 98,50%, maka capaian kinerjanya adalah 102,28%.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 469.877.811.336,- yang terealisasi sebesar Rp. 314.931.064.285,- atau 67,02%

c. Program Pendidikan Menengah

Pencapaian Program Pendidikan Menengah diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu:

a) Angka Kelulusan SMA/MA

Pada tahun 2011, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 18.391 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 18.268 siswa atau 99,33%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,78%.

b) Angka Kelulusan (AL) SMK

Pada tahun 2011, jumlah siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 15.452 siswa dari 15.461 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian atau 99,94 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,25 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,71%.

c) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 136.529 jiwa, sedangkan siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 117.101 siswa atau 85,77% dengan rincian 61.441 siswa atau 45,00% pada jenjang SMA/MA dan 55.660 siswa atau 40,77% pada jenjang SMK. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85% untuk jenjang SMA/MA dan 79,25% untuk jenjang SMK maka capaiannya adalah 52,94% untuk SMA/MA dan 51,44% untuk SMK sehingga capaian kinerja Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA/MA/SMK mencapai 100,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

Pada tahun 2011, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 136.529 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 143.477 siswa atau 105,09% dengan rincian 75.280 siswa atau 55,14% pada jenjang SMA/MA dan 68.197 siswa atau 49,95% pada jenjang SMK. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 105% maka capaiannya adalah 52,51% untuk SMA/MA dan 47,57% untuk SMK sehingga capaian kinerja angka partisipasi kasar untuk jenjang SMA/MA/SMK mencapai 100,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105%.

e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

Pada tahun 2011, jumlah siswa pada jenjang SMA/MA sebanyak 73.919 jiwa, siswa, sedangkan jumlah siswa yang putus sekolah jenjang SMA/MA sebanyak 34 siswa atau 0,05%, sehingga capaian kinerjanya

mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,05%.

f) Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Pada tahun 2011, jumlah siswa pada jenjang SMA/MA SMK sebanyak 69.559 siswa, sedangkan jumlah siswa yang putus sekolah jenjang SMK sebanyak 32 siswa atau 0,05%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,05%.

g) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK

Pada tahun 2011, jumlah siswa tingkat SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.260 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 34.434 siswa atau 90,00% melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87,50 %, maka capaian kinerjanya adalah 102,86%.

h) Persentase lulusan SMK yang diterima bekerja/wirausaha

Pada tahun 2011, jumlah siswa kejuruan yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 15.452 siswa, sedangkan yang diterima bekerja/berwirausaha sebanyak 9.740 siswa atau 63,03%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 55%, maka capaian kinerjanya mencapai 114,61%.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program pendidikan menengah didukung alokasi dana sebesar Rp. 171.194.116.308,- yang terealisasi sebesar Rp. 142.042.266.274,- atau 82,97%.

d. Program Pendidikan Non Formal

Pembangunan pendidikan non formal yang dalam hal ini adalah pendidikan luar sekolah, dilakukan untuk menekan jumlah penduduk yang buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas.

Pada Tahun 2011 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.326.260 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan usia tersebut yang bisa membaca dan menulis sebanyak 2.326.260 jiwa atau 100%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya

mencapai 100%.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program pendidikan non formal didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 10.625.500.287,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.964.551.598,- atau 84,37%.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dari pendidik maupun tenaga kependidikan agar dapat memenuhi standar Kualifikasi. Pada Tahun 2011, jumlah guru pendidik di Surabaya sebanyak 28.949 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 25.548 orang atau 88,25 % telah memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan target 84,08% maka capaian kinerjanya adalah 104,96%.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak lepas dari dukungan alokasi dana sebesar Rp. 44.364.849.352,- yang terealisasi sebesar Rp. 35.679.508.470,- atau 80,42%.

A. URUSAN WAJIB KESEHATAN

Urusan Wajib Kesehatan diimplementasikan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program program tersebut diuraikan sebagai berikut::

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian keberhasilan Program Upaya Kesehatan Masyarakat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pada tahun 2011, jumlah warga miskin yang terdapat di Surabaya adalah sebesar 606.238 jiwa, dari jumlah tersebut yang sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ada;ah 483.361 kunjungan (79,73%). Namun demikian dari seluruh kunjungan warga miskin yang sakit semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

Pada tahun 2011, dari 160 kelurahan di Surabaya, 67 kelurahan dinyatakan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB), dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kelurahan atau 100% berhasil ditangani dalam tempo kurang dari 24 jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 100% maka capaian kerjanya adalah 100 %.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Upaya Kesehatan masyarakat didukung alokasi dana sebesar Rp. 176.605.459.153,- yang terealisasi sebesar Rp. 147.193.326.100,- atau 83,35%.

b. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Pencapaian keberhasilan Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Rasio Puskesmas Induk Yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Pada tahun 2010, jumlah puskesmas induk yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya berjumlah 53 puskesmas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 puskesmas merupakan puskesmas dengan layanan rawat inap. Sebagai upaya nyata Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama pada lokasi yang jauh dari rumah sakit, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya melakukan optimalisasi pelayanan kesehatan melalui penambahan layanan rawat inap di 3 puskesmas, dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah puskesmas rawat inap di Kota Surabaya berjumlah sebesar 15 puskesmas. Apabila dibandingkan dengan target peningkatan rasio puskesmas rawat inap menjadi sebesar 29% (15 unit) maka capaiannya adalah sebesar 100%.

2. Rasio Puskesmas Pembantu Yang Meningkatkan Menjadi Puskesmas Induk

Selain sarana kesehatan berupa puskesmas, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berfungsi sebagai penunjang pelayanan kesehatan puskesmas dengan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2010 sebanyak 69 unit.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di pustu merupakan masalah utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, oleh karena itu sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan status pustu menjadi puskesmas induk secara bertahap. Sampai dengan tahun 2011, jumlah pustu yang ditingkatkan menjadi puskesmas induk berjumlah 5 pustu. Apabila dibandingkan dengan target peningkatan rasio puskesmas induk sebesar 3% (2 unit), maka capaiannya sebesar 250%.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 57.062.690.424,- yang terealisasi sebesar Rp. 40.665.934.207,- atau 71,27%.

c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pencapaian keberhasilan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. *Bed Occupation Ratio*

Bed Occupation Ratio (BOR) atau pemakaian tempat tidur merupakan indikator kinerja rumah sakit yang dipergunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal sesuai dengan Kementerian Kesehatan adalah 60-85%. Pada tahun 2011, nilai BOR pada RSUD dr. M. Soewandhie tercatat sebesar 77.52% dari jumlah total tempat tidur rumah sakit sebesar 189 tempat tidur. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa nilai BOR di RSUD dr. M. Soewandhie berada pada *range* ideal. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 73%, maka capaiannya sebesar 106,19%.

Untuk RSUD Bhakti Dharma Husada, pada tahun 2011 BOR-nya tercatat sebesar 29,24%, hal ini berarti bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan masih sangat minim. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kegiatan promosi pelayanan kesehatan serta penyediaan sarana prasarana kesehatan secara bertahap di RSUD Bhakti Dharma Husada.

2. Bed Turn Over Rate

Indikator *Bed Turn Over (BTO) Rate* adalah nilai frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali tempat tidur rumah sakit dipakai dalam satu satuan waktu tertentu, misalnya satu tahun. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur di rumah sakit. Pada tahun 2011, BTO di RSUD. Dr. M. Soewandhie tercatat sebesar 89.42 Kali, artinya terjadi overload pada pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya melalui percepatan pembangunan gedung baru RSUD dr. M. Soewandhie yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2012. Sedangkan BTO pada RSUD Bhakti Dharma Husada tercatat sebesar 19.69 Kali. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada masih rendah.

3. Turn Over Interval selama 1 sampai 3 hari

Turn Over Interval atau TOI adalah waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pelayanan di Rumah Sakit. Pada tahun 2011 Turn Over Interval di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sebesar 0,92 hari atau kurang dari satu hari (24 jam) sedangkan pada RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar 13,12 hari.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata didukung alokasi dana sebesar Rp. 72.877.939.282,- yang terealisasi sebesar Rp. 33.140.958.508,- atau 45,47%.

d. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pencapaian keberhasilan Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu:

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Jumlah kunjungan ibu hamil K4 yang tercatat selama tahun 2011 adalah 39.895 ibu hamil dari 41.322 prediksi ibu hamil. Sehingga cakupan kunjungan ibu hamil K4 disarana pelayanan kesehatan sebesar 96,55%. Apabila Dibandingkan dengan target sebesar 98% maka capaian kinerjanya adalah 98,52%.

2. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan yang tercatat selama tahun 2011 adalah 36.551 bayi dari prediksi 42.264 bayi. Sehingga cakupan kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan sebesar 86,48%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 80% maka capaian kerjanya adalah 108,10%.

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pada tahun 2011, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 37.511 orang dari prediksi 39.444 ibu bersalin. Sehingga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 95,10%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96%, maka capaian kerjanya adalah 99,06%.

4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi 0-11 Bulan

Cakupan imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan di Kota Surabaya tahun 2011 berdasarkan jenis imunisasi yang ada sebagai berikut:

- cakupan imunisasi BCG sebesar 79,85% dari target 90% sehingga capaiannya adalah 88,72%
- cakupan imunisasi DPT1 + HB1 sebesar 84,37% dari target 90% sehingga capaiannya adalah 93,74%
- cakupan imunisasi DPT3 + HB3 sebesar 76,78% dari target 90% sehingga capaiannya adalah 85,31%
- cakupan imunisasi polio 4 sebesar 75,01% dari target 90% sehingga capaiannya adalah 83,30%
- cakupan imunisasi campak sebesar 71,74% dari target 85% sehingga capaiannya adalah 84,40%

5. Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Pada tahun 2011 di Kota Surabaya terdapat 1,027 balita gizi buruk yang tercatat. Dari 1,027 balita gizi buruk tersebut, sebesar 100% atau seluruh balita gizi

buruk mendapatkan perawatan dan intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaiannya adalah 100%. Adapaun angka prevalensi balita gizi buruk di Kota Surabaya pada tahun 2011 tercatat sebesar 0,64%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009 sebesar 1,39% dan tahun 2010 sebesar 0,95%, maka terdapat penurunan prevalensi balita gizi buruk yang cukup signifikan. Namun demikian, pemerintah Kota Surabaya senantiasa berupaya untuk terus menekan prevalensi balita gizi buruk secara aktif, diantaranya melakukan upaya skrining dan intervensi pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak tidak terlepas dari dukungan alokasi dana sebesar Rp. 39.298.079.405,- yang terealisasi sebesar Rp. 37.383.227.072,- atau 95,13%.

B. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Urusan Wajib Pekerjaan Umum diimplementasikan melalui 3 (empat) program yaitu Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Program Pengendalian Banjir. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Pencapaian keberhasilan Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Cakupan Layanan Air Bersih

Indikator cakupan layanan air bersih menunjukkan persentase wilayah Surabaya yang telah meendapatkan layanan air bersih. Berdasarkan data dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2011 nilai cakupan layanan air bersih di Surabaya adalah sebesar 83,49%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81,58% maka capaian kinerjanya adalah 102,34%.

2. Kebocoran Air Bersih Yaitu Sebesar

Persentase kebocoran air bersih yang rendah menunjukkan meningkatnya kendali mutu terhadap penyaluran air bersih kepada masyarakat. Menurut data yang

dihimpun dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2011 persentase kebocoran air bersih Kota Surabaya adalah sebesar 35,75% sehingga capaian kinerjanya adalah 93,12% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 33,45%.

Guna menunjang kesuksesan pemberian layanan air bersih kepada masyarakat Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di 7 lokasi.

Pencapaian dari sejumlah target indikator sasaran dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 1.319.699.286,- yang terealisasi sebesar Rp. 521.494.946,- atau 39,52%.

b. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit. Sampai dengan tahun 2011 Surabaya telah memiliki jalan Kota sepanjang 1.426,647 Kilometer dimana 1.381,995 Kilometer diantaranya dalam kondisi baik dan 44,652 kilometer dalam kondisi rusak. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di Kota Surabaya selama tahun 2011 adalah 6 jam 36 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 100,25%.

Capaian kinerja program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan dapat terlaksana berkat adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 368.425.385.282,- yang terealisasi sebesar Rp. 152.550.801.866,- atau 41,41%.

c. Program Pengendalian Banjir

Pencapaian keberhasilan Program Pengendalian Banjir diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Luas Wilayah Genangan

Luas area genangan antara lain tergantung pada tingkat curah hujan, kapasitas saluran drainase dan kemampuan pompa banjir yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Luas area genangan di Kota Surabaya pada tahun 2011 sebesar 2213 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2.387 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 107,29%. Luas area genangan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 273 Ha dari 2.486 Ha luas genangan yang terjadi pada tahun 2010.

2. Lama Terjadinya Genangan

Lama terjadinya genangan air diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan genangan air untuk surut. Lama terjadinya genangan di Kota Surabaya pada tahun 2011 mencapai 54,00 menit atau 0.90 jam, sehingga capaian kinerjanya mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan selama 60 menit atau 1 jam. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2010, rata-rata waktu genangan pada tahun 2011 lebih kecil dari rata-rata waktu genangan 90 menit 1,5 jam pada tahun 2010.

Beberapa kawasan di Surabaya yang memiliki waktu genangan air yang cukup lama untuk surut dengan waktu lebih dari 1 jam antara lain Sumberejo, Tambakdono, Babat Jerawat, Sememi, Kandangan, Tambak Mayor, Jemursari dan Ngagel Tirto.

3. Tinggi Genangan Yang Terjadi

Pada tahun 2011, rata-rata tinggi genangan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya adalah 18,64 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 106.80% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, rata-rata tinggi genangan pada tahun 2011 lebih kecil dari rata-rata tinggi genangan 25 cm pada tahun 2010.

Pencapaian indikator kinerja pada program pengendalian banjir tidak terlepas dari adanya alokasi anggaran sebesar Rp. 241.763.252.366,- yang terealisasi sebesar Rp. 94.370.742.454,- atau 39,03%

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Urusan Wajib Perumahan diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Program Utilitas Perkotaan serta Program Perumahan dan Permukiman. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pencapaian kinerja program pencegahan dan penanggulangan kebakaran diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Frekuensi Kejadian Kebakaran Per Satu Juta Penduduk

Indikator ini menunjukkan besarnya jumlah kejadian kebakaran di Surabaya dibandingkan dengan setiap satu juta penduduk. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Surabaya adalah 3.024.321 jiwa, sedangkan jumlah kejadian kebakaran yang terjadi adalah 366 kejadian sehingga frekuensi kejadian kebakaran per satu juta penduduk adalah 121 kejadian. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 103 kejadian maka capaian kinerjanya adalah 85,52%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk sehingga luas kawasan permukiman juga meningkat dan semakin meningkat pula potensi kejadian kebakaran.

2. Jangkauan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Pada tahun 2011, wilayah Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen kebakaran adalah 251,36 km² dari 305,57 km² luas wilayah Surabaya tanpa termasuk wilayah mangrove sehingga jangkauannya adalah 82,26%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79% maka capaian kinerjanya adalah 104,13%.

3. Pencapaian Waktu Tanggap Kurang Dari 15 Menit

Sepanjang tahun 2011 tercatat telah terjadi 366 kejadian kebakaran yang telah ditanggapi oleh Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Dari seluruh kejadian tersebut 305 atau 83,33% diantaranya dapat ditanggapi kurang dari 15 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 73%, maka capaian kinerjanya adalah 114,15%.

Pencapaian kinerja pada program pencegahan dan penanggulangan kebakaran didukung adanya alokasi anggaran sebesar Rp. 26.652.007.456,- yang terealisasi sebesar Rp. 16.759.833.027,- atau 62,88%

b. Program Utilitas Perkotaan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya cakupan layanan penerangan jalan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah rasio panjang jalan yang sudah mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Kota Surabaya. Pada tahun 2011 ditetapkan target sebesar 73,15%. Capaian di tahun 2011 yaitu panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan jalan adalah 1.772.520 kilometer dimana panjang jalan kota Surabaya termasuk jalan lingkungan adalah 2.379.530,9 kilometer atau 74,49% sudah mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan sebesar 73,15% maka capaian kinerjanya adalah 101,83%.

Capaian kinerja program utilitas perkotaan tidak terlepas dari adanya alokasi dana sebesar Rp. 92.831.550.075,- yang terealisasi sebesar Rp. 82.161.081.765,- atau 88,51%.

c. Program Perumahan dan Permukiman

Pencapaian kinerja pada program perumahan dan permukiman diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Luas Kawasan Tidak Layak Huni Yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman

Pada tahun 2011 penambahan luas kawasan tidak layak huni yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman adalah seluas 40,5 Ha. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 42,19% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 96 Ha. Hal ini antara lain disebabkan karena pengesahan RAPBD 2011 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2011, sedangkan penyelesaian pekerjaan paling lambat dilaksanakan sampai dengan pertengahan bulan Desember 2011, sehingga banyak pekerjaan pendukung peningkatan layanan prasarana permukiman yang membutuhkan waktu lebih dari 8 bulan tidak dapat dilaksanakan.

2. Rasio Kebutuhan Makam Selama Lima Tahun Ke Depan Terhadap Angka Ketersediaan Makam

Pada tahun 2011, luas lahan makam yang tersedia dan belum dimanfaatkan adalah sebesar 32,06 Ha sedangkan lahan makam yang dibutuhkan selama lima tahun kedepan adalah sebesar 6,76 Ha, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target rasio yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0.21.

3. Jumlah MBR Yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni

Pada Tahun 2011, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni adalah sebesar 2.545 KK atau meningkat sebanyak 96 KK (384 orang) dari 2.449 KK pada tahun 2010 sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.497 KK.

Capaian kinerja program perumahan dan permukiman tidak terlepas dari adanya alokasi dana sebesar Rp. 111.708.217.510,- yang terealisasi sebesar Rp.

49.354.401.333,- atau 44,18%.

5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Urusan wajib Penataan Ruang diimplementasikan melalui Program Penataan Ruang. Pada tahun 2011 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 17,38%. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang pada tahun 2011 adalah 18,26 % sehingga capaian kinerjanya adalah 105,07 %.

Capaian kinerja pada program penataan ruang didukung adanya alokasi dana sebesar Rp.18.193.689.671,- yang terealisasi sebesar Rp. 12.584.113.329,- atau 69,17%

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diimplementasikan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian dari program ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sebesar 100%.

Pada tahun 2011, dari 4 Dokumen perencanaan yang disusun, yang telah diselesaikan tepat waktu (waktu keterlambatan dibawah 15%) adalah 3 dokumen atau 75%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 75%. Keterlambatan penyelesaian dokumen ini antara lain disebabkan karena waktu yang diperlukan untuk melakukan pengamatan lapangan atas usulan masyarakat yang masuk sebagai bahan perencanaan cukup lama.

Pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah didukung dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp. 23.711.512.709,- yang terealisasi sebesar Rp. 15.745.003.997 atau 66,40%.

7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Urusan Wajib Perhubungan diimplementasikan melalui Program Pengembangan Sistem Transportasi. Program Pengembangan Sistem Transportasi

dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum. Pencapaian program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan

Pada tahun 2011, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer adalah sebesar 26.22 Km/jam dan ruas jalan arteri sekunder sebesar 30.56 Km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 23,73 Km/jam untuk ruas jalan arteri primer dan 21,47 Km/jam untuk ruas jalan arteri sekunder maka capaian kinerjanya adalah 110.49 % untuk ruas jalan arteri primer dan 142.36 % untuk ruas jalan arteri sekunder.

2. Headway Angkutan Umum

Sampai dengan tahun 2011, jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 78 trayek yang terdiri dari 58 trayek angkutan kota dengan 4.139 unit armada dan 20 trayek bus kota dengan 167 unit armada. Dengan armada yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 17,21 menit untuk mikrolet/angkutan kota dan 35,12 menit untuk bus kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit untuk mikrolet/angkutan kota dan 32,41 menit untuk bus kota maka capaian kinerjanya adalah sebesar 83,08% untuk mikrolet/angkutan kota dan 91,64 % untuk bus kota.

Pencapaian target program pengembangan sistem transportasi tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 77.836.750.350,- yang terealisasi sebesar Rp. 59.124.554.948,- atau 75,96%.

8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Wajib Lingkungan Hidup diimplementasikan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan kebersihan kota, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Pencapaian sasaran program pengelolaan kebersihan kota diukur melalui 3

(tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2011, di Surabaya telah terdapat 174 TPS sementara kebutuhan TPS adalah 175 TPS sehingga cakupan layanan kebersihan adalah 0,99. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0,94 maka capaian kinerjanya adalah 105,77%.

2. Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA

Pada tahun 2011, jumlah sampah yang dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebanyak 1.150,02 ton/hari. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1.229,39 ton/hari maka capaian kinerjanya adalah 106,46%.

3. Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS

Pada tahun 2011, rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah sebanyak 3.554,55 m³/hari. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 3.588,82m³/hari maka capaian kinerjanya adalah 100,95%.

Pencapaian target program pengelolaan kebersihan kota didukung alokasi dana sebesar Rp. 113.332.094.538,- yang terealisasi sebesar Rp. 95.829.923.820,- atau 84,56%

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan.

1. Meningkatnya Kualitas Air

Indikator meningkatnya kualitas air ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase penurunan beban pencemaran yang ditimbulkan oleh aktifitas kegiatan/usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah. Cara pengukurannya adalah dengan menjumlahkan prosentase penurunan beban tahun lalu dengan perbandingan selisih beban pencemar tahun lalu dan beban pencemar tahun ini terhadap beban pencemar tahun lalu. Beban pencemaran air limbah dari suatu

kegiatan/usaha (industri, rumah sakit, domestik dan hotel) dapat diukur dari konsentrasi kadar BOD, COD dan TSS dalam air limbah.

BOD (Biological Oxygen Demand) adalah analisis empiris untuk mengukur proses-proses biologis (khususnya aktivitas mikroorganisme) yang berlangsung di dalam air. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara biokimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (non- biodegradable). TSS (Total Suspended Solid) adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik.

2. Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator meningkatnya kualitas udara diukur berdasarkan meningkatnya prosentase penurunan kadar polutan dari emisi sumber tidak bergerak/industri pada parameter Sulfur dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂) yang merupakan kontributor utama hujan asam. Cara pengukurannya adalah dengan menjumlahkan prosentase penurunan kadar polutan tahun lalu dengan perbandingan selisih kadar polutan tahun lalu dan kadar polutan tahun ini terhadap kadar polutan tahun lalu.

Dari hasil pengujian yang dilaksanakan pada tahun 2011 terhadap 8 sampel udara emisi industri, didapat prosentase penurunan SO₂ sebesar 65,25% dan NO₂ sebesar 46,06%

Apabila dibandingkan dengan target penurunan kadar SO₂ sebesar 65%, dan NO₂ sebesar 45% maka capaian kinerjanya adalah 100,38 % dan 102,36 %.

Atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada bidang lingkungan hidup, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain:

- Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia
- Adiwiyata Mandiri untuk SDN Kandangan III dari Presiden Republik Indonesia
- Adiwiyata Tahun Pertama SDN Kandangan I, SDN Perak Barat, SDK Santa Maria serta SMPN 16 dari Presiden Republik Indonesia
- ASEAN *Environment Sustainable City* (ESC) dari Menteri Lingkungan Hidup

-
- Penghargaan Kota Berkualitas Udara Baik Kategori Kota Metropolitan dari Menteri Lingkungan Hidup

Pencapaian target program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak terlepas dari dukungan alokasi dana sebesar Rp. 11.232.914.272,- yang terealisasi sebesar Rp. 9.435.495.698,- atau 84%.

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan untuk mencapai target indikator luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada sebesar 21,27 %. Pada tahun 2011, RTH yang dioptimalkan mencapai 399,44 Ha atau 5,99% dari luas RTH 6.670,42 Ha sehingga sampai dengan tahun 2011 akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 1.475,16 Ha atau 22,11% dari luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 103,95 %.

Atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau, maka pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Taman Kota Terbaik untuk Kategori Kota Metropolitan dari Presiden Republik Indonesia dan *Indonesian Green Region Award (IGRA)*..

Pencapaian target program pengendalian pengelolaan ruang terbuka hijau didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 66.163.489.250,- yang terealisasi sebesar Rp. 33.259.118.114,- atau 50,27%

9. URUSAN WAJIB PERTANAHAN

Urusan wajib pertanahan diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota.

Pada tahun 2011, jumlah aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat adalah sebanyak 539 atau 43,09% dari total aset Pemerintah Kota Surabaya sebesar 1.251 Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 557 maka capaian kinerjanya adalah 96,77%.

Pencapaian target program sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 6.350.895.301,- yang terealisasi sebesar Rp.

2.791.709.360,- atau 43,96%

10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dengan proses administrasi yang tetap tertata. Pencapaian sasaran program penataan administrasi kependudukan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penduduk ber-KTP

Pada tahun 2011, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sejumlah 2.029.828 jiwa dari total 2.279.532 jiwa wajib KTP atau 89% yang keseluruhan (100%) telah berbasis NIK. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87% maka capaian kerjanya adalah 102%.

2. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Pada tahun 2011, tercatat ada 39.804 kelahiran dimana 37.374 atau 94% diantaranya telah dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 76% maka capaian kerjanya adalah 124%.

Pencapaian target program penataan administrasi kependudukan didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 13.953.378.922,- yang terealisasi sebesar Rp. 7.190.712.672,- atau 51,53 %.

11.URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Gender di Surabaya adalah sebesar 64,45 point. Di Surabaya juga terdapat 85 lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga maka capaian kinerjanya adalah 100 %.

Atas Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam peyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden Republik Indonesia dan penghargaan tingkat nasional sebagai kota layak anak yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pencapaian target program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 4.443.412.775,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.858.672.263,- atau 86,84%.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2011, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan adalah sebanyak 294 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 294 kasus atau 100% telah ditangani. Penanganan sejumlah kasus juga telah berkontribusi menurunkan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 0,05% dari jumlah rumah tangga 593.604. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Non KDRT dan trafficking (perdagangan orang).

Pencapaian target program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tidak terlepas dari dukungan alokasi dana sebesar Rp. 1.533.052.219,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.149.513.950,- atau 74,98%.

12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Keluarga Berencana:

Pada tahun 2011, dari 474.973 Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat 401.733

peserta KB aktif atau 84,58 % diantaranya yang menjadi peserta KB aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 78,04% maka capaian kinerjanya adalah 108,38%.

Atas prestasinya dalam pelaksanaan program keluarga berencana, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Anugerah Kencana yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pencapaian kinerja program keluarga berencana tidak bisa dilepaskan dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 3.646.963.152,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.850.433.463,- atau 78,16%.

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

Urusan Wajib Sosial diimplementasikan melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2011, dari 63.707 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya, sebanyak 33.937 orang atau 53,27 % telah berhasil ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 20% maka capaian kinerjanya adalah 266,35%. Pola pembinaan perubahan perilaku bagi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti pemberian pelayanan dasar antara lain berupa pelatihan usaha mandiri; bimbingan sosial serta pemberian jaminan sosial dan selanjutnya akan dikembalikan ke daerah asalnya atau dikembalikan ke keluarganya (masyarakat) untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Pencapaian kinerja program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial didukung alokasi dana sebesar Rp. 18.321.695.528,- yang terealisasi sebesar Rp. 15.660.391.283,- atau 85,47%.

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2011 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 30%. Selama tahun 2011, persentase PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial adalah 398 PSKS atau mencapai 30,24% dari 1316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 30% maka capaian kinerjanya adalah 100,8%.

Pencapaian kinerja program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial didukung alokasi dana sebesar Rp. 2.152.264.751,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.768.831.480,- atau 82,18%.

14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Kedua program ini diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program peningkatan kesempatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi segenap pencari kerja di Kota Surabaya. Pada Tahun 2011 dari 91.390 orang pencari kerja, sebanyak 3.568 orang atau 3,90% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 97,50%. Tidak tercapainya target program ini dikarenakan ada satu jenis pelatihan yang tidak terlaksana (pelatihan satpam).

Pencapaian kinerja program peningkatan kesempatan kerja didukung alokasi dana sebesar Rp. 16.701.530.893,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.939.114.925,- atau 71,49%.

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator Prosentase penyelesaian sengketa pekerja pengusaha. Pada tahun 2011 terdapat 213 kasus sengketa pekerja pengusaha dimana 155 kasus atau 72,77% diantaranya telah berhasil diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 72% maka capaian kinerjanya adalah 101,07%.

Pencapaian kinerja program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan didukung alokasi dana sebesar Rp. 2.562.518.854,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.165.730.480,- atau 84,52%.

15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diimplementasikan dalam 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah serta Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator jumlah kelompok skala mikro-kecil-menengah yang memiliki daya saing, yang dimaksud dengan daya saing adalah usaha skala mikro-kecil-menengah yang memiliki standar pengelolaan usaha, dimana kelompok tersebut masih aktif melakukan usaha dan memiliki aspek daya saing dari segi aset, proses dan kinerja. Pada tahun 2011 jumlah kelompok skala mikro-kecil-menengah yang memiliki daya saing sebanyak 34 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 29 kelompok, maka capaian kinerjanya adalah 117,24%. Pada tahun 2011 juga telah terbentuk 5 komunitas skala mikro-kecil baru di Surabaya.

Pencapaian kinerja program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah didukung alokasi dana sebesar Rp. 30.853.627.159,- yang terealisasi sebesar Rp. 17.764.050.866,- atau 57,58%.

b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas

Yang dimaksud dengan Koperasi berkualitas adalah koperasi aktif yang mampu melaksanakan RAT. Pada tahun 2011 dari total 858 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak 172 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian

kinerjanya adalah 100%.

2. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Pasif Yang Berhasil Direvitalisasi

Pada tahun 2011, terdapat 466 koperasi yang berstatus koperasi pasif. Dari jumlah tersebut 74 unit diantaranya telah berhasil direvitalisasi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 100 unit maka capaian kinerjanya adalah 74%, dimana faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan adalah keputusan pengurus dan anggota dari beberapa koperasi pasif tersebut untuk membubarkan kelembagaan koperasinya.

3. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Baru Koperasi Yang Terbentuk

Pada tahun 2011, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 90 unit atau meningkat sebanyak 30 unit dari 60 unit pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut 30 unit diantaranya adalah koperasi baru. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 unit maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Atas upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kelembagaan koperasi, maka pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional Pataka Paramadhana Madya dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi didukung alokasi dana sebesar Rp. 3.943.192.324,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.187.728.260,- atau 80,84%.

16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terutama dalam pelayanan perijinan penunjang investasi.

Pada tahun 2011, jumlah PMA dan PMDN adalah sebanyak 520 PMA dan 409 PMDN. Jumlah tersebut meningkat 13% dari 437 PMA dan 385 PMDN pada tahun 2010. Meningkatnya iklim investasi di Surabaya ditunjukkan dengan peningkatan kemudahan berusaha yang diukur dengan nilai interval konversi indek kepuasan masyarakat terutama dalam pelayanan perijinan penunjang investasi sebesar 75,21%, Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75% maka capaian kinerjanya adalah 100,28%.

Pencapaian kinerja program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi tidak terlepas dari adanya alokasi dana sebesar Rp. 4.684.084.960,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.486.512.150,- atau 74,43%.

C. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Pada Tahun 2011 Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya sebanyak 125 kelompok seni. Dari pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan terhadap 135 kelompok seni di Surabaya, seluruhnya layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 108%.

Pencapaian kinerja program pengelolaan keragaman budaya didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 2.308.656.806,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.049.969.150,- atau 88,79%.

17. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya

kualitas pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri. Pada tahun 2011, terdapat 60 pemuda/kelompok pemuda yang telah mampu mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 60 pemuda/kelompok pemuda maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program peningkatan peran serta kepemudaan tidak terlepas dari adanya alokasi dana sebesar Rp. 3.379.569.088,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.000.138.970,- atau 88,77%.

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pencapaian program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Atlet/Organisasi Olahraga Yang Berprestasi

Pada tahun 2011, atlet/organisasi olahraga di Surabaya yang telah berhasil menorehkan prestasi sebanyak 1.186 atlet/organisasi dari 43 cabang olahraga yang telah dibina. Cabang-cabang yang berprestasi antara lain judo, kempo, pencak silat, gulat, hockey, renang, voli, panjat tebing, anggar dan bulutangkis. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1.186 atlet/organisasi maka capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Prasarana Olahraga Yang Dikembangkan

Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sebanyak 40 prasarana berupa pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana olahraga. Sehingga, sampai dengan tahun 2011 jumlah prasarana olahraga yang dikembangkan adalah sebanyak 122 prasarana. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 122 maka capaian kinerjanya adalah 100%.

3. Jenis Olahraga Rekreasi Yang Digali, Dibina Dan Dikembangkan

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah menggali, membina dan mengembangkan sebanyak 5 jenis olahraga rekreasi. Sehingga, sampai dengan

tahun 2011 jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan adalah sebanyak 28 jenis. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 28 jenis maka capaian kerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 53.394.612.229,- yang terealisasi sebesar Rp. 34.281.742.215,- atau 64,20%.

18. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan). Pada tahun 2011, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 60.011 objek, dari jumlah tersebut 100% telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal tidak terlepas dari dukungan alokasi dana sebesar Rp. 31.918.041.863,- yang terealisasi sebesar Rp. 25.440.816.938,- atau 79,71%.

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program yaitu Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Penataan Daerah Otonom, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah bertujuan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya telah mengajukan usul prakarsa sebanyak 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Pelayanan Publik, Raperda Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dan Raperda Pengelolaan Sampah. Dari 3. usulan tersebut, sebanyak 3 Raperda telah ditindaklanjuti dengan melalui rapat paripurna untuk menjadi prakarsa DPRD yaitu Raperda Pelayanan Publik, Raperda Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dan Raperda Pengelolaan Sampah. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4 Raperda maka capaian kinerjanya adalah 75%.

2. Persentase Raperda yang Ditindaklanjuti Dalam Rapat Paripurna

Pada tahun 2011, jumlah total seluruh Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dibahas di DPRD Kota Surabaya adalah 14 Raperda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 Raperda atau 71.43% telah ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 69% maka capaian kinerjanya adalah 103,52%.

3. Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti DPRD

Indikator ini menggambarkan tingkat respon DPRD terhadap keluhan yang masuk dari masyarakat. Pada tahun 2011 tercatat ada 155 keluhan yang masuk ke DPRD Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut sebanyak 129 keluhan atau 83.23% telah ditindaklanjuti DPRD dengan melalui rapat hearing. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70% maka capaian kinerjanya adalah 118,9%.

4. Jumlah Publik Hearing yang Dilaksanakan

Sepanjang tahun 2011, DPRD Kota Surabaya telah mengadakan 4 kali Publik Hearing yaitu mengenai Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Peraturan Walikota Surabaya No. 57 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame terbatas pada Kawasan Khusus Surabaya, Permasalahan YKP, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012, dan Pengkajian RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 59.992.337.733,- yang terealisasi sebesar Rp. 33.047.947.527,- atau 55,09%.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 dengan target APBD sebesar Rp. 2.139.625.575.460,- terealisasi Rp. 1.887.112.299.640,- atau mencapai 88,20%. Angka realisasi Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 972.515.383.354,- atau 106,33% dari tahun 2010 sebesar Rp. 914.596.916.286,-

Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 101,87% sedangkan realisasinya sebesar 106,33%, maka capaian kinerjanya adalah 104,38%.

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

b.a) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 mencapai Rp. 1.488.358.147.753,- atau mencapai 87,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.691.550.000.000,-. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 78,87%. Pajak daerah yang dipungut langsung oleh

Pemerintah Kota Surabaya.

b.b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah di Kota Surabaya dipungut dari 25 jenis retribusi, dengan rincian retribusi jasa umum terdiri dari 10 jenis retribusi, retribusi jasa usaha terdiri dari 11 jenis retribusi, retribusi perijinan tertentu terdiri dari 4 jenis retribusi. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp. 209.817.967.778,- atau mencapai 78,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 265.797.243.579,-. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,124%.

Dari 3 jenis retribusi capaian yang tertinggi adalah retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 61.420.688.588,- atau 139,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 44.065.396.000,-.

b.c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga

Pada tahun 2011 penerimaan bagian laba atas penyertaan modal adalah sebesar Rp. 75.962.115.306,- atau mencapai 98,63% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 77.019.175.680,-. Kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pihak ketiga terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,03%.

b.d) Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan asset yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan penerimaan lain-lain. Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 77.223.387.669,- atau mencapai 95,06% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 81.237.692.147,-.

b.e) Lain-lain PAD yang Sah BLUD

Penerimaan lain-lain PAD yang sah BLUD berasal dari pendapatan BLUD-

RSUD Dr. Soewandhie pada Tahun 2011 sebesar Rp. 35.750.681.135,- atau tercapai 148,83% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 24.021.464.054.

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya

Pada tahun 2011, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai Rp. 1.872.520.125.730,- atau 100,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1,869.603.377.385,-. Angka realisasi Tahun 2011 mengalami pengurangan sebesar Rp.262.956.890.297,- atau -12,31% dari tahun 2010 sebesar Rp. 2.135.477.016.027,-. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar -15,46% sedangkan realisasinya sebesar -12,31%, maka capaian kerjanya adalah 79,64%.

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari Penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya terdiri dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2011 mencapai Rp. 963.419.947.354,- atau mencapai 99,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 973.067.060.126,-. Kontribusi penerimaan dana perimbangan terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 51,45%.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2011 mencapai Rp. 909.100.178.376,- atau mencapai 101,40% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 896.541.317.259,-. Kontribusi penerimaan dana perimbangan terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 48,55%.

3. Persentase Laporan yang Selesai Tepat Waktu

Pada tahun 2011, Laporan keuangan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 46 laporan atau 97,47% dari target 53 laporan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% maka capaian kerjanya adalah 122,34%.

Pencapaian kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 79.808.837.268,- yang terealisasi sebesar Rp. 46.062.821.189,- atau 57,72%.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diukur dengan indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur. Pada tahun 2011, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah sebanyak 135 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Sedangkan yang telah terbukti melakukan pelanggaran/indisipliner dan mendapatkan sanksi adalah sebanyak 69 kasus. Dari 69 kasus tersebut sebanyak 92 orang aparatur telah mendapatkan sanksi diantaranya meliputi tegoran lisan, tegoran tertulis, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala dan pemberhentian sementara. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 221 kasus, maka capaian kinerjanya adalah 168,77%

Pelanggaran disiplin aparatur dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur. Apabila pada tahun 2010 jumlah pelanggaran hukum dan disiplin aparatur sebesar 108, maka Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur pada tahun 2011 adalah sebesar 85,18%,

Pencapaian kinerja program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH tidak terlepas dari adanya dukungan oleh alokasi dana sebesar Rp. 6.821.450.141,- yang terealisasi sebesar Rp. 5.706.505.170,- atau 83,66%.

d. Program Penataan Daerah Otonom

Pencapaian kinerja program penataan daerah otonom diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Meningkatnya Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebesar 23%. Kebutuhan patok batas wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya dalah sebesar 3.829 patok. Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Surabaya telah memasang 150 patok batas wilayah kecamatan dan kelurahan. Sehingga sampai dengan tahun 2011 jumlah patok batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang telah terpasang adalah sebanyak 874 patok atau

23%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program penataan daerah otonom tidak terlepas dari adanya dukungan oleh alokasi dana sebesar Rp. 43.268.592.999,- yang terealisasi sebesar Rp. 29.478.291.969,- atau 68,13%.

e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja sebesar 87,50%. Pada tahun 2011, Jumlah MOU kerjasama antar pemerintah daerah yang berlaku adalah 17 MOU. Dari sejumlah MOU tersebut, 16 MOU atau 94,11% diantaranya telah ditindaklanjuti dengan program kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya adalah 107,56%.

Pencapaian kinerja program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 4.237.538.645,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.047.033.425,- atau 71,91%.

f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja program penataan peraturan perundang-undangan diukur dengan indikator Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2011, dari 60 jumlah rancangan produk hukum yang diajukan, sebanyak 60 rancangan produk hukum yang terselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program penataan peraturan perundang-undangan didukung oleh alokasi dana sebesar Rp. 5.017.581.692,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.075.528.409,- atau 61,30%.

g. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Pada tahun 2011, jumlah pejabat struktural di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 1518 orang. Dari jumlah tersebut 1267 orang atau 83,47% diantaranya telah mengikuti diklat struktural. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85% maka capaian kinerjanya adalah 98,2%.

2. Persentase penataan jabatan struktural sebesar 86,78%

Pada tahun 2011, jumlah jabatan struktural di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 1955 jabatan. Dari jumlah tersebut 1518 orang atau 77,65% diantaranya telah menempati jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86,78 % maka capaian kinerjanya adalah 89,48%. Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya penambahan jumlah pejabat eselon IVa dan IVb pada Dinas Kesehatan/Puskesmas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 14.494.305.589,- yang terealisasi sebesar Rp. 10.690.683.479,- atau 73,76%.

h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pencapaian program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) Yang Memiliki Prosedur Tetap

Pemrosesan Produk inti adalah pemrosesan rancangan Peraturan Walikota yang diajukan oleh SKPD untuk menjadi Peraturan Walikota. Pada Tahun 2011, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 12 produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2011 dari 240 produk inti dimana 129 diantaranya adalah layanan publik, terdapat 75 atau 31,25% pemrosesan produk inti yang 66 diantaranya adalah layanan publik. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 29% maka capaian kinerjanya adalah 107,75%.

2. Persentase SKPD Yang Telah Melaksanakan Hasil Analisa Jabatan Dan Beban Kerja

Pada tahun 2011, dari 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selain Kelurahan, sebanyak 5 SKPD atau 6,94% telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 7% maka capaian kinerjanya adalah 99,2%.

Pencapaian kinerja program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 21.303.731.234,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.358.002.331,- atau 53,31%.

i. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Surabaya telah menerima 698 keluhan dari masyarakat melalui *Media Center*,

Dari keseluruhan keluhan tersebut, sebanyak 698 keluhan atau 100% diantaranya telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 1.511.979.829,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.086.889.230,- atau 71,89%.

20. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

Urusan wajib ketahanan pangan diimplementasikan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Pencapaian kinerja program ini diukur dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan (PPH). Pada tahun 2011, skor PPH Kota Surabaya adalah sebesar 87,6. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86,71 maka capaian kinerjanya adalah 101,03%.

Ditinjau dari sisi ketersediaan bahan pangan (beras) maka indeks kecukupan pangan untuk kota Surabaya adalah 1,68 yang mengandung pengertian bahwa ketersediaan pangan di kota Surabaya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Surabaya bahkan berlebih.

Pencapaian kinerja program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 7.251.365.011,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.255.425.653,- atau 86,27%.

21. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini dimaksudkan untuk mencapai indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2011, jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif atau telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 3.347 orang dari 14.000 orang atau 23,91%. Usaha ekonomi produktif melalui 307 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terdiri dari bidang usaha makanan, handycraft dan aneka usaha sesuai dengan fasilitasi pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang maka capaian kerjanya adalah 225,08%.

Pencapaian kinerja program penanggulangan kemiskinan didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 16.863.556.551,- yang terealisasi sebesar Rp. 10.898.580.350,- atau 64,63%.

22. URUSAN WAJIB KEARSIPAN

Urusan wajib kearsipan diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase SKPD yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku). Pada tahun 2011, dari 232 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebanyak 79 SKPD atau 34% telah melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 34% maka capaian kerjanya adalah 100%. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diantaranya meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pencapaian kinerja program perbaikan sistem administrasi kearsipan tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 2.394.685.731,- yang

teralisasi sebesar Rp. 2.007.098.665,- atau 83,81%.

23. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa serta Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan Kota Surabaya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang mengakses situs resmi milik Pemerintah Kota Surabaya yang berisikan informasi-informasi seputar Kota Surabaya. Pada tahun 2011, rata-rata jumlah kunjungan pada setiap bulannya adalah sebanyak 30.989 kunjungan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 41.399 kunjungan maka capaian kinerjanya adalah 74,85%. Tidak tercapainya target kunjungan ini karena masih banyaknya *website* milik SKPD di Pemerintah Kota Surabaya yang masih belum terintegrasi dalam *sub domain* surabaya.go.id.

Pencapaian kinerja program penataan pengembangan komunikasi informasi dan media massa tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 7.703.393.254,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.606.964.479,- atau 85,77%.

b. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan indikator Rasio antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun 5 aplikasi layanan publik. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4,63% atau setara dengan 5 aplikasi dari target sebesar 108 aplikasi maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian kinerja program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 26.966.931.585,- yang terealisasi sebesar Rp. 22.895.084.601,- atau 84,90%.

24. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

Urusan wajib perpustakaan diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Pencapaian program ini diukur dengan indikator jumlah kunjungan perpustakaan. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan tercatat sebanyak 1.506.592 orang dimana sebanyak 3.265 orang diantaranya merupakan anggota baru. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 1.369.931 orang maka capaian kinerjanya adalah 109,98%.

Pencapaian kinerja program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 10.567.928.898,- yang terealisasi sebesar Rp. 9.641.185.855,- atau 91,23%.

D. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Urusan pilihan pertanian diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: Pencapaian program ini diukur dengan indikator Jumlah kelompok pelaku usaha yang produktif dalam bidang pertanian yang terbentuk. Pada tahun 2011 jumlah kelompok pelaku usaha usaha yang mendapatkan pembinaan sehingga mampu menjadi pelaku usaha yang produktif dalam bidang pertanian adalah sebanyak 58 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 49 Kelompok maka capaian kinerjanya adalah 118,37%.

Dari kelompok-kelompok pelaku usaha bidang pertanian yang terbentuk apabila diklasifikasikan kedalam jenis produk pertaniannya terbentuk 18 sentra produk pertanian antara lain sentra cabe di Kec. Lakarsantri dan Kec. Sambikerep, sentra mangga di Kec. Benowo, Kec. Pakal, Kec. Lakarsantri dan kec. Sambikerep,

sentra semangka dan garbis di Kec Bulak, sentra padi di Kec Lakarsantri dan Kec. Sambikerep.

Pencapaian kinerja program peningkatan kesejahteraan petani tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 9.655.828.936,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.771.539.417,- atau 49,42%.

2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA

Urusan pilihan pariwisata diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian program pengembangan pemasaran pariwisata diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2011, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Surabaya adalah 279.230 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 162.869 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 171,44%.

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2011, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Surabaya adalah 9.194.116 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 7.656.584 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 120,08%.

Pencapaian pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 10.643.913.040,- yang terealisasi sebesar Rp. 9.227.646.848,- atau 86,69%.

b. Program Pengembangan Destinasi Wisata

Pencapaian program pengembangan destinasi pariwisata diukur dengan indikator jumlah kawasan cagar budaya yang menjadi destinasi wisata. Pada tahun

2011, dari 180 bangunan dan 10 situs cagar budaya yang dilindungi, terdapat 7 lokasi kawasan cagar budaya yang telah berhasil ditingkatkan menjadi destinasi wisata. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 7 lokasi paket maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan dimanfaatkannya cagar budaya menjadi destinasi wisata maka Kota Surabaya mempunyai 11 lokasi destinasi wisata yaitu Tugu Pahlawan, Kawasan Masjid Ampel, Gedung Balai Pemuda, Masjid Agung Al Akbar, Ciputra Water Park, Monumen Jalesveva Jayamahe, Masjid Cheng Ho, Kampung pecinan, Klenteng Sanggar Agung, Kenjeran dan Museum House of Sampoerna.

Pencapaian pelaksanaan program pengembangan destinasi wisata tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 1.001.326.522,- yang terealisasi sebesar Rp. 827.267.123,- atau 82,62%.

3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan pilihan kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Pencapaian kinerja program ini diukur dengan indikator jumlah kelompok pelaku usaha yang produktif bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk. Pada tahun 2011, jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk adalah sebanyak 19 kelompok. Kelompok ini telah mendapatkan pembinaan sehingga menjadi pelaku usaha yang produktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 19 kelompok maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Kelompok-kelompok tersebut berada di 6 (enam) kelurahan pada kawasan pesisir yaitu kelurahan Kedung cowek, Greges, Wonorejo, Tambaklangon, Keputih dan Bulak Banteng.

Pencapaian kinerja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 10.944.322.249,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.474.407.480,- atau 40,88%.

4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Urusan pilihan perdagangan diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan serta Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. **Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

Pencapaian kinerja program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Sentra Baru PKL

Pada tahun 2011, jumlah sentra pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya adalah 22 sentra. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 7 sentra dibandingkan tahun 2010, yaitu sebanyak 15 sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 11 sentra maka capaian kinerjanya adalah 63,64%, dimana faktor utama yang menyebabkan tidak terbangunnya beberapa sentra yang telah direncanakan adalah adanya penolakan dari kelompok masyarakat di lokasi pembangunan, seperti Sentra PKL Jambangan dan Sentra PKL Dharmawangsa.

2. Peningkatan Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Usaha

Pada tahun 2011, dari 22 sentra PKL sebanyak 15 sentra telah memiliki daya saing usaha. Jumlah ini meningkat 7 sentra dibandingkan dengan 8 sentra pada tahun 2010. Yang dimaksud dengan memiliki daya saing usaha adalah Sentra PKL telah memiliki kelembagaan dan standar pengelolaan usaha yang jelas. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 15 sentra maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Pencapaian pelaksanaan program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan tidak terlepas dari adanya dukungan alokasi dana sebesar Rp. 13.752.647.409,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.100.374.747,- atau 44,36%.

b. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Pencapaian kinerja program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan diukur dengan indikator prosentase penyelesaian sengketa konsumen. Pada tahun 2011, dari 46 laporan sengketa konsumen sebanyak 46 laporan atau 100% diantaranya telah berhasil diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan sebesar 78% maka capaian kinerjanya adalah 128,21%.

Pencapaian pelaksanaan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan didukung oleh adanya alokasi dana sebesar Rp. 1.093.627.617,- yang terealisasi sebesar Rp. 899.851.022,- atau 82,28%..

E . TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan meliputi : Kerjasama antar Daerah; kerjasama dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertical di Daerah; pembinaan atas batas Wilayah;pencegahan dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

a. Kerjasama Antar Daerah

Dalam era otonomi terjadi proses regionalisasi yang ditandai dengan keterikatan antar daerah otonom bertetangga karena kepentingan dan ketergantungan. Sementara itu demokratisasi yang terjadi meningkatkan komunikasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Sedangkan globalisasi yang tidak terbendung lagi membawa dampak pada dinamika perekonomian nasional dan internasional serta memunculkan kompetensi lokal, nasional dan internasional. Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan beberapa kota di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri mitra kerjasama Kota Surabaya yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sampai dengan akhir tahun 2011 adalah:

-
1. Kabupaten Sidoarjo
 2. Kota Bandung
 3. Kota Banjarmasin
 4. Kota Batam
 5. Kota Yogyakarta
 6. Kota Padang
 7. Kabupaten Gresik
 8. Kabupaten Kotawaringin Timur
 9. Provinsi Jawa Timur
 10. Kota Denpasar

Sementara, ada pula beberapa daerah lain yang masih dalam tahap peninjauan antara lain dengan Kota Mataram dan Kota Makassar.

b. Kerjasama Luar Negeri

Selain dengan kota- kota dalam negeri, Kota Surabaya juga telah memiliki beberapa sistercity di luar negeri, diantaranya:

1. Seattle (AS)
2. Busan (Korsel)
3. Kochi (Jepang)
4. Guangzhou (RRC)
5. Xiamen (RRC)
6. Varna (Bulgaria)
7. Monterrey (Meksiko)
8. Shah Alam (Malaysia)
9. Marseille (Perancis)

Kota-kota di Luar Negeri yang masih dalam proses peninjauan antara lain Izmir (Turki) dan Johannesburg (Afrika Selatan).

c. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pihak ketiga yang diajak kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2011 antara lain :

-
1. Kepolisian Daerah Jawa Timur
 2. PT. Pertamina (Persero)
 3. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya
 4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 5. PT. Surya Timur Sakti Jawa Timur
 6. Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR)
 7. Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
 8. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya
 9. Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS)
 10. KOPERTIS Wilayah VIII
 11. Kanwil X Dirjen Kekayaan Negara
 12. PT. Surabaya Televisi Indonesia
 13. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)
 14. PT. Pembangkit Jawa Bali (Persero)
 15. PT. TELKOM (Tbk)
 16. Universitas Hang Tuah Surabaya
 17. World Bank
 18. CLAIR Singapura
 19. IBM

d. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Kota Surabaya, dilakukan dengan hampir semua instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Departemen Dalam Negeri Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dll. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Kota Surabaya tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat.

Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LAKIP Kota, pendampingan evaluasi LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan system informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja camat.

Dengan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Surabaya selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (e-Procurement), Pemerintah Kota Surabaya juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dll.

e. Pembinaan Batas Wilayah

Pada Tahun 2011 fokus Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya baik dilapangan maupun diatas peta, adapun tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan di Kota Surabaya, sedangkan peta wilayah bertujuan sebagai sarana untuk mendeteksi secara dini dan sebagai bahan acuan untuk memperoleh informasi serta meningkatkan pengawasan, monitoring dan koordinasi dan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah administrasi Kecamatan/ kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2011, pemasangan pilar batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 150 patok. 100 patok Kelurahan di 4 Kelurahan (Kelurahan Made, Kelurahan Sambikerep, Kelurahan Bringin, Kelurahan Lontar) dan 50 patok di 2 Kecamatan (Kecamatan Genteng dan Kecamatan

Tegalsari).

f. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Secara Geografis Kota Surabaya tidak termasuk daerah rawan bencana karena cukup jauh dari gunung berapi aktif dan tidak dialiri oleh sungai-sungai besar sehingga sampai saat ini relatif tidak pernah terjadi bencana di Kota Surabaya. Namun demikian dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan Pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermanfaat kepada masyarakat.

Selanjutnya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Surabaya telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya, yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/65/436.1.2/2010 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya

g. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Gangguan yang terjadi berupa SARA, Anarkisme, Sparatisma atau yang lainnya pada sepanjang pada Tahun 2011 ada 4 kejadian yang 1 sudah terselesaikan yaitu masalah Gereja Saksi Saksi Yehuwa Jl. Thamrin No. 68 Surabaya dan masih ada 3 permasalahan yang mendekati SARA s/d tahun 2011 belum terselesaikan yaitu;

- 1) Masjid Al – Ikhlas Sidosermo PDK Jl. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya

-
- 2) Gereja Kristen Indonesia Gayungsari Jl. Gayungsari Barat No. 64-66 Surabaya
 - 3) Gereja Kristen Indonesia Bajem Mulyosari Jl. Mulyosari Prima Utara Blok MR Surabaya

tahun 2011 meliputi 4 kejadian yang meliputi, Masjid Radatul Falah Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mengenai Permasalahan kas dana masjid dan Sekolah Pelangi Kristus Jl. Jemur Handayani XII No. 33 – 48 Kecamatan Wonocolo. Sedangkan untuk Gangguan Anarkisme pada tahun 2010 diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) permasalahan yaitu Ekonomi, Politik dan sosial Budaya, dimana pada tahun 2011 terjadi permasalahan^{ekonomi} sebanyak 54 kejadian, Politik 35 kejadian dan sosial^{Budaya} 203 kejadian.

F. PENUTUP

Capaian kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kerja bersama (kolektif) antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Surabaya. Pemerintah Kota telah mencoba

memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2011, merupakan kesinambungan dari penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, pendapat dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat menyampaikan melalui www.surabaya.go.id atau melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya Jl. Jimerto No 25-27 lantai V Surabaya Telepon: 031-5312144 psw. 601